



Produksi Tempat Cuci Tangan Portabel

Pekerja memproduksi tempat cuci tangan portabel di Bandung, Jawa Barat, Senin (13/4/2020). Tempat cuci tangan (wastafel) portabel yang diproduksi sebanyak 40 buah ini akan didistribusikan ke pasar-pasar dan taman kota di Bandung sebagai upaya meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat guna mencegah penyebaran COVID-19.

SIAPKAN PADAT KARYA BAGI EKS PEKERJA MIGRAN

PUPR Siapkan Rp 36 T untuk Tangani Covid-19

Oleh Tri Murti

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealokasikan dan memfokus ulang (*refocusing*) anggaran program kerja kementerian sebesar Rp 36,19 triliun dari total anggaran 2020 sebesar Rp 120 triliun untuk membantu penanganan pandemik Covid-19.

"Jadi dari Rp 120 triliun, anggaran Kementerian PUPR 2020 direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp 36,19 triliun dengan (anggaran) program padat karya sebesar Rp 10 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Senin (13/4).

Realokasi pertama yaitu anggaran yang dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung untuk bantuan sosial (Bansos) dan kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19 sebesar Rp 24,53 triliun.

"Anggaran Rp 24,53 triliun ini berasal dari, seperti arahan bapak Presiden, memangkas 50% perjalanan dinas dan biaya rapat kerja dan sejenisnya seperti seminar," papar Basuki.

Ia menambahkan, anggaran tersebut juga terdiri atas anggaran untuk membuat paket-paket pekerjaan yang ditunda namun masih akan dikerjakan tahun depan.

"Jadi bisa diistilah kami di-*jereng*. Yang tadinya *single year* menjadi *multiyear*, jadi itu masih bisa dikerjakan untuk tahun depan. Kemudian untuk paket-paket yang *software* yang bisa ditunda, kita *off-kan* baru nanti tahun depan kita kerjakan. Totalnya adalah sekali lagi Rp 24,53 triliun," jelas Menteri Basuki.

Kemudian untuk *refocusing* anggaran terbagi dua proyek yaitu pertama untuk pelaksanaan pembangunan yang langsung dibutuhkan untuk mengatasi Covid-19.

"Seperti penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang sebesar Rp 400 miliar, kemudian merehabilitasi

rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, kemudian juga untuk pembelian alat-alat pendukung lainnya. Ini totalnya semua adalah Rp 1,66 triliun," kata Basuki.

Kedua, *refocusing* anggaran juga dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan proyek padat karya tunai.

Proyek padat karya tunai, kata Basuki, adalah proyek memberikan pekerjaan yang sederhana (*low technology*) tetapi banyak menyerap tenaga kerja kepada masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini. Anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 10,22 triliun.

"Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya di perdesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa," kata dia.

Gandeng Kemenlu

Sementara itu, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tengah mendata pekerja migran yang pulang dari Malaysia untuk diberdayakan dalam program padat karya.

"Kami sedang bekerja sama dengan Kemenlu yang WNI (warga negara Indonesia) yang pulang dari Malaysia diidentifikasi dari mana asalnya, kami siapkan program padat karya," kata Menteri Basuki.

Menurut dia, pemerintah menyiapkan program-program padat karya, terutama di daerah-daerah kantong pekerja migran seiring dengan pandemi Covid-19.

Diharapkan, kata dia, para eks



Basuki Hadimuljono

pekerja migran itu bisa bekerja di program-program padat karya yang disiapkan pemerintah, setelah menjalani isolasi mandiri sepuluh hari di negeri jiran itu.

Lebih jauh, terkait pelaksanaan program padat karya tunai, Menteri PUPR memaparkan mekanisme yang pertama adalah merekrut tendamping untuk tiap proyek yang dikerjakan, kemudian memberikan sosialisasi, sebelum pengerjaan di lapangan.

"Jadi bulan April ini sudah mulai, minggu pertama bulan April sudah mulai di beberapa lokasi," kata Basuki.

Dalam pelaksanaan program padat karya tunai yang menyerap banyak tenaga kerja tersebut bisa dilaksanakan, karena tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, untuk proyek perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi perdesaan yang biasanya dilakukan 70-80 orang per lokasi. Pekerjaan itu kini dibagi dua *shift* (sehingga yang bekerja hanya 35-40 orang per lokasi).

"Itu nanti kami atur jadwal (*schedule*) kerjanya seminggu-seminggu sehingga itu tadinya dikerjakan dua bulan bisa dikerjakan menjadi tiga bulan," kata Basuki.

Adapun kepada pekerja program padat karya tunai tersebut, upahnya dibayarkan mingguan.

"Ada yang setiap hari Kamis, seperti di daerah-daerah Tegay, Pekalongan, itu Kamis, membayar upah tenaga kerjanya. Ada yang setiap hari Minggu," kata Basuki.

Program perbaikan irigasi di 10.000 lokasi itu memakan biaya Rp 2,250 triliun. Masing-masing lokasi dianggarkan biaya sebesar Rp 225 juta. Selain perbaikan irigasi perdesaan, program padat karya tunai juga terdiri atas beberapa kegiatan lain seperti pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yaitu perbaikan jalan-jalan produksi di persawahan yang berada di 900 kecamatan.

Kemudian ada juga program kota tanpa kumuh (Kotaku), yaitu program swakelola peremajaan daerah perkotaan yang ada di 364 kelurahan. Lalu program rumah swadaya yaitu program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 222.000 rumah diremajakan.

Kemudian anggaran program padat karya tunai juga dialokasikan untuk program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) dan penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) yang dikerjakan oleh masyarakat desa secara mandiri.

"Pengerjaannya ada di 1.208 lokasi, dengan total anggaran Rp 391 miliar," kata Basuki.

Basuki juga mengatakan dalam program padat karya tunai, pemerintah akan berupaya membeli hasil perkebunan produksi masyarakat, seperti karet yang saat ini sedang turun harganya. Karet-karet itu akan diolah untuk membuat campuran cat marka jalan saat pengaspalan dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

"Kami sudah siapkan Rp100 miliar yang kami beli langsung dari Koperasi-Koperasi di kawasan penghasil karet, seperti Pontianak, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Riau. Kami akan beli karet-karet rakyat," kata Basuki.

Adapun jalan yang akan dilakukan pemeliharaan sepanjang 47.000 kilometer dan jembatan sepanjang 496 kilometer.

"Kami juga ingin memelihara rutin jembatan sepanjang 496 kilometer sebesar Rp110 miliar dan pemeliharaan jalan 47.000 kilometer sebesar Rp 500 miliar. Itu swakelola bisa dikerjakan secara padat karya," kata Basuki. (e01)

Bandara Soetta dan Halim Dukung PSBB Jabodetabek

JAKARTA - Berada dan dikepeng sejumlah wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PT Angkasa Pura/AP II (Persero) memastikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) dan Bandara Halim Perdanakusuma (Halim) sudah siap mendukung kebijakan untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tersebut.

Bahkan, AP II memastikan Bandara Soetta sudah sangat siap dengan penerapan kebijakan PSBB di Banten yang notabene merupakan provinsi di mana lokasi bandara tersebut di Indonesia itu berada.

"Bandara Soekarno-Hatta terletak di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, kami optimis dengan penerapan kebijakan PSBB di Banten yang notabene merupakan provinsi di mana lokasi bandara tersebut di Indonesia itu berada. Melalui *minimum operation*, Terminal 1B, 1C, dan 2F Bandara Soetta ditutup, dan pelayanan hingga saat ini dilakukan selama 24 jam di Terminal 1A, 2D, 2E, dan seluruh Terminal 3.

"Pembatasan sosial secara masif di Soetta tersebut diharapkan dapat turut membantu penerapan PSBB secara penuh di tiga wilayah di Banten," ujarnya.

Sementara itu, PSBB telah diberlakukan mulai 10 April 2020 di DKI Jakarta, seiring dengan itu, operasional penerbangan penumpang di Bandara Soetta dan Halim pada 10-11 April 2020 telah mengalami penyesuaian. Dengan penyesuaian tersebut, pergerakan pesawat di Soetta pada 10 April tercatat 328 pergerakan atau turun 3,24% dibandingkan dengan 9 April sebanyak 339 pergerakan pesawat. Kemudian, pada 11 April jumlah pergerakan pesawat adalah 253 pergerakan atau turun 22,86% dibandingkan dengan 10 April.

Hampir sama dengan di Soetta, penurunan penerbangan juga terjadi di Bandara Halim. Pada 10 April tercatat 75 pergerakan pesawat atau turun 20,21% dibandingkan dengan 9 April yang sebanyak 95 pergerakan. Pada 11 April di Halim Perdanakusuma terdapat 53 pergerakan pesawat atau turun 29,33% dibandingkan dengan 10 April.

"Penerbangan memang mengalami penurunan, namun di sisi lain hal ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 seiring dengan berlakunya PSBB," jelas Muhammad Awaluddin.

Dia pun menuturkan bahwa operasional penerbangan yang masih terlihat sedikit bergairah adalah penerbangan kargo.



Muhammad Awaluddin

Terintegrasi PSBB Jabodetabek

Lebih jauh, Muhammad Awaluddin mengatakan, operasional Bandara Soetta dan Halim juga sangat erat kaitannya dengan penerapan PSBB di DKI Jakarta, tiga wilayah Banten, serta Bogor, Depok, dan Bekasi yang juga telah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Peran kedua bandara ini cukup vital, di mana merupakan penyangga konektivitas transportasi udara di Indonesia dan bandara utama dan pusat kegiatan bagi warga Jabodetabek.

"PT Angkasa Pura II telah menjalankan pembatasan sosial di kedua bandara ini sehingga terintegrasi dengan PSBB di DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, dan Bekasi. Kami menerapkan peraturan dan ketentuan yang sama guna mendukung pemerintah setempat dalam menerapkan PSBB secara penuh," jelas Awaluddin.

PT Angkasa Pura II dan para pemangku kepentingan di bandara juga terus berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sesuai Pasal 14 Permenhub tersebut dinyatakan antara lain kapasitas (*slot time*) bandara harus berkurang dan jumlah penumpang pesawat paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan *physical distancing*.

Lebih jauh, kata Awaluddin, *slot time* di Soekarno-Hatta dan Halim sudah berkurang, frekuensi penerbangan juga berkurang salah satunya karena masyarakat memenuhi arahan *work from home* dan PSBB DKI Jakarta.

"PT Angkasa Pura II dan maskapai juga memastikan jumlah penumpang pesawat maksimal 50% pada setiap penerbangan. Jumlah penumpang di transportasi publik seperti bus dan lain sebagainya juga akan mengikuti peraturan, di mana jumlah penumpang maksimal 50% dari kapasitas," ujar Muhammad Awaluddin.

Di samping itu, personel di terminal penumpang seperti aviation security (Avsec) juga akan membantu penerapan PSBB, misalnya memastikan adanya *physical distancing* di antara para traveler/pengunjung bandara dan meminta agar mereka selalu menggunakan masker selama di bandara. (tm)

TERANCAM BANGKRUT

Aliansi Ground Handling Minta Insentif

JAKARTA - Aliansi *Ground Handling* Indonesia (AGHI) mengharapkan keringanan dan insentif dari pemerintah serta *stakeholders* di tengah lesunya industri penerbangan dunia imbas pandemi virus corona (Covid-19). Tanpa adanya insentif, para pelaku usaha *ground handling* terancam bangkrut.

Ketua Umum AGHI Ida Pangelingsir mengatakan, semua maskapai penerbangan sudah dan terus mengurangi jumlah penerbangan, baik rute dan frekuensinya, sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Saat ini jumlah penerbangan yang ditangani telah menurun drastis sampai 80% karena adanya

pembatasan lalu lintas penumpang di seluruh negara, dalam rangka menghambat pandemi Covid-19, sehingga maskapai berhenti beroperasi dan atau mengurangi frekuensi sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan," jelas Ida Pangelingsir dalam keterangan resminya, Senin (13/4).

Dia melanjutkan, apabila pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama lagi, industri *ground handling* yang merupakan industri penunjang bisnis penerbangan, akan semakin terpuruk. Bahkan, menurut Ida Pangelingsir, sebagian anggota AGHI akan bangkrut.

"Tidak mungkin sumber daya *ground handling* kami di-stand-

by-kan mendukung operasional bandara dan maskapai, tanpa adanya kepastian penghasilan. Perusahaan *ground handling* pun menghadapi tekanan atas biaya tetap," ujar dia.

Ida mengakui, untuk mengurangi kerugian yang diderita beberapa waktu belakangan ini, sejumlah anggota AGHI sudah bersiap mengantisipasi, bahkan banyak di antaranya sudah melakukan langkah-langkah strategis. Dia menjelaskan, sebagai sebuah perusahaan yang berkarater padat modal sekaligus padat karya serta *fully regulated*, anggota AGHI tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan usaha dan keberada-

an karyawan.

"Namun demikian, sangat sulit bagi kami untuk bisa mempertahankan karyawan dengan biaya operasional besar tanpa pemasukan. Akhirnya opsi menutup operasi, merumahkan karyawan atau *unpaid leave*, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja sangat dimungkinkan terjadi," jelas Ida Pangelingsir.

Dia menyebutkan, guna menyelamatkan industri *ground handling* agar tetap eksis hingga saat pemulihan nanti, AGHI akan intensif melakukan audiensi dan atau berkomunikasi untuk meminta sejumlah keringanan dan insentif dari pemerintah serta *stakeholders* penerbangan. (esa)

CIMB NIAGA

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN PT BANK CIMB NIAGA Tbk ("PERSEROAN")

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2020, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Final tahun buku 2019 dalam bentuk tunai ("Dividen") kepada para pemegang saham Perseroan sebesar-besarnya Rp1.392.161.339.032 (gross) atau seling-gingnya 40% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019. Dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, baik pemegang saham kelas A maupun kelas B ("Saham") yang seluruhnya berjumlah 25.131.606.843 saham (sebelum dikurangi saham dalam trespun), sehingga setiap pemegang/pemilik (1 satu) saham akan memperoleh Dividen sekurang-kurangnya Rp55,39 (gross).

Adapun jadwal dan ketentuan serta tatacara pembagian Dividen tersebut adalah sebagai berikut:

- Jadwal:
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 17 April 2020
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 20 April 2020
 - Cum Dividen di Pasar Tunai 22 April 2020
 - Recording Date pemegang saham yang berhak 22 April 2020
 - Ex Dividen di Pasar Tunai 23 April 2020
 - Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019 8 Mei 2020
- Ketentuan dan tata-cara pembagian Dividen tersebut adalah sebagai berikut:
 - Ilkan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham;
 - Dividen akan dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2020 (30 hari sejak diputuskan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan) kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2020 pukul 16:00 WIB ("Recording Date"), atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan tanggal 22 April 2020;
 - Para pemegang saham yang namanya tercatat tanpa warkat (*scripless*) dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka:
 - Dividen akan dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI;
 - Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian;
 - Pemegang saham akan menerima informasi saldo Rekening Efektifnya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
 - Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam bentuk warkat (*scrip*) pada Biro Administrasi Efek PT Bima Registrasi ("BAE"), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang saham diminta agar mengubuhkan BAE pada setiap hari kerja pukul 09:00 - 15:00 WIB, dengan alamat di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan F.R. D. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818 Faks.: (+6221) 25984819, Email: dividen@bimaregistra.co.id, dengan menyerahkan:
 - Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) dan memperlihatkan aslinya (bagi pemegang saham perorangan);
 - Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain, disertai fotokopi bukti identitas diri pemberi dan penerima kuasa yang berlaku;
 - Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum tersebut serta fotokopi identitas diri yang berlaku dan Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut (bagi pemegang saham badan hukum);
 - Memberitahukan nomor rekening Bank (atas nama pemegang saham);
 - BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD") kepada Pemegang Saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa dividennya telah diklaim;
 - Perseroan akan membayarkan dividen kepada para pemegang saham melalui transfer bank setelah mendapat konfirmasi dan validasi dari BAE;
 - Dividen yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia
- Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai perjanjian Persewaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty yang mengizinkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, agar menginformasikan/menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk formulir *Directorate General of Taxation* ("DGT") dan/atau *Certificate of Residence* (CoR) yang telah disahkan oleh *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara setempat selambat-lambatnya tanggal 22 April 2020 pada pukul 16:00 WIB kepada:
 - KSEI bagi para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (*scripless*), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;
 - BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*scrip*), jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau CoR asli belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.
- Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang tidak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selambat-lambatnya tanggal 22 April 2020 pada pukul 16:00 WIB kepada:
 - KSEI bagi para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (*scripless*), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;
 - BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (*scrip*), jika sampai dengan tanggal tersebut NPWP belum diterima, maka terhadap pemegang saham tersebut tidak dapat diberikan Bukti Potong Pajak.

Informasi iklan pemberitahuan ini telah tersedia juga pada situs web Perusahaan (www.cimbniaga.co.id).

Jakarta, 14 April 2020

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretariat Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 - Jakarta Selatan 12190
Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749,
E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; Situs Web: www.cimbniaga.co.id